

PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM DI DESA TASIKADU

Oleh: Ego Hanata Renggana

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjend. Haryono 193 Malang

Abstract

Pekerjaan sebagai seorang nelayan sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini berdasarkan pada konsep negara kesejahteraan yang dicanangkan pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada warganya secara adil dan merata. Salah satu upaya pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan nelayan adalah dengan melaksanakan program Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan yang diperuntukkan bagi seluruh nelayan yang ada di Indonesia.

Job as a fisherman should received special attention from government. This is based on the concept of welfare state which proclaimed by government to all elements of society. Therefore, the government must give a protection to citizens fairly and equally. One of the government's efforts to pay attention to fishermen's welfare is by implementing a program of Insurance Premiums for Fishermen that is intended for all fishermen in Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai perbedaan yang sangat mencolok. Yang mana Negara memberikan kebebasan kepada setiap masyarakatnya yang berada di dalamnya untuk andil berpendapat atau disebut demokrasi. Demokrasi adalah salah satu ciri dari negara kesatuan republik Indonesia. Secara etimologis, Demokrasi berasal dari kata Yunani 'demos' yang berarti rakyat dan 'kratos' yang berarti kekuasaan atau berkuasa.

Demokrasi menuntut rakyat Indonesia dari keadaan yang sangat suram hingga ke masa modernisasi ini. Jumlah kebutuhan negara Indonesia sangat banyak. Termasuk didalamnya meledaknya kebutuhan pangan dan kepadatan penduduk yang berada didalamnya.

Pada tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai hampir 262 juta jiwa. Meskipun jumlah populasi besar, tetapi didominasi oleh usia produktif sehingga angka ketergantungan cenderung meningkat. Angka ketergantungan, yakni jumlah penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk produktif pada 2016 sebesar 48,4 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibanding pada tahun 1971 yang mencapai 86,6 persen.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut oleh karena itu Indonesia mendapat julukan sebagai negara maritim. Badan Informasi Geospasial (BIG) menyebutkan bahwa total garis pantai Indonesia adalah 99.093 kilometer (*National Geographic* Indonesia, 2013), maka dari itu hampir di setiap daerah ada nelayan. Laut Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki

merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional.

Selain itu Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur segala kehidupan masyarakat dan pedoman bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2016, Undang-Undang tersebut lantas menjadi sebuah regulasi yang secara jelas mengatur tentang perlindungan hukum bagi nelayan yang ada di Indonesia agar terhindar dari kerugian yang bisa saja dialaminya akibat dari resiko pekerjaan yang beragam. Ketentuan ini sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 huruf (e) melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran. Disamping itu, perlindungan dalam upaya mensejahterakan kaum nelayan merupakan salah satu Program Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2016, sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Pada program kerja ini pula dicantumkan bahwa nelayan di Indonesia harus mendapatkan perlindungan asuransi yang di targetkan pemerintah mencapai 1 juta asuransi bagi nelayan yang tersebar di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 3 Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan. Angka 4 menyebutkan Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkapan Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkapan Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT).

Sebagian besar Masyarakat Nelayan di daerah pesisir masih minim pengetahuan tentang hukum, perlindungan seperti apa yang mereka dapatkan. Namun demikian hukum menuntut agar warga masyarakat berbuat sesuai dengan harapan masyarakat atau berfungsi sebagai kontrol sosial, demikian pula hukum berfungsi sarana memperlancar proses interaksi sosial, yaitu dengan memandang hukum sebagai suatu mekanisme kontrol sosial yang bersifat umum dan beroperasi secara merata di hampir seluruh sektor kehidupan di masyarakat. Dalam perkembangan usaha perikanan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik namun demikian penegakan dan jaminan hukum bagi masyarakat nelayan belum terasa di kalangan masyarakat nelayan pesisir. Masyarakat nelayan merupakan unsur sosial yang sangat penting dalam struktur masyarakat pesisir, kebudayaan yang mereka miliki mewarnai karakteristik kebudayaan dan perilaku sosial budaya masyarakat pesisir secara umum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Yuridis Sosiologis” dikarenakan menilai dari kebenaran yang ada atau fakta, dengan mengidentifikasi efektifitas hukum di masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, Penelitian non doctrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk memperoleh teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat. Tipologi penelitian ini sering disebut *social Legal Research*. Sedangkan yuridis empiris adalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan keadaan yang ada atau studi kasus.

Penelitian ini menitik beratkan kepada penelitian di lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan diteliti permasalahannya dari masalah yang ada. Ditinjau dari Undang-undang yang berlaku di Masyarakat. Maka, adapun pendekatan yang digunakan adalah “Yuridis Empiris”. Pada penelitian ini penulis menekankan pada bekerjanya peraturan perundang-undangan dan di sinergikan kepada keadaan yang ada di lapangan atau realita sosiologis yang terjadi masyarakat. Kemudian menganalisis keadaan yang ada di lapangan dan melakukan pengolahan data sesuai dengan fakta yang terjadi saat ini di lapangan.

Sesuai dengan judul Penelitian Karya Ilmiah ini (skripsi), maka lokasi penelitian ini berada di Pantai Prigi Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Nelayan yang mengalami kecelakaan kerja atau hilangnya nyawa berdasarkan Pasal 30 ayat 2 huruf b Undang-Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan dan Pertambakan Garam. Risiko yang dihadapi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Penggaraman
- b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- c. jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan. Dapat dijabarkan adanya perjanjian yang dilakukan antara Nelayan dengan Perusahaan asuransi. Sehingga dalam perjanjian dapat di perjanjikan kesepakatan maupun prestasi yang akan terlahir untuk melakukan pelaksanaan jaminan keselamatan yang tertuang dalam Pasal 30 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Dalam pelaksanaannya maka ada sesuatu yang di jadikan akad dalam perjanjian itu sendiri. Peserta tenaga kerja luar hubungan kerja sementara itu, bagi anda yang berstatus pekerja mandiri apakah sebagai freelancer ataupun entrepreneur tanpa badan usaha untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan dibutuhkan sebuah wadah organisasi. Jadi, anda dapat membentuk wadah ataupun organisasi yang terdiri minimal 10 orang yang kemudian didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan.

Sama halnya dengan pendaftaran tenaga kerja dalam hubungan kerja, Anda dapat membuka halaman web BPJS Ketenagakerjaan. Silakan gunakan alamat perwakilan organisasi kelompok anda. Kemudian, anda bisa tunggu pemberitahuan dari BPJS Ketenagakerjaan. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Anda dapat membawa dokumen yang telah disiapkan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Bicara soal BPJS Ketenagakerjaan, apa saja sebenarnya manfaat yang akan anda terima ketika sudah jadi peserta? Jawabannya, ada banyak! Beberapa program manfaat yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, di antaranya adalah sebagai berikut: Program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK, program Jaminan Hari Tua atau JHT, program Jaminan Kematian atau JKM serta program Jaminan

kesehatan.

Melalui program-program ini diharapkan para pekerja akan memiliki kesejahteraan ekonomi dan sosial. Paling tidak, para pekerja dapat meminimalisir risiko akibat beberapa kejadian tak diinginkan ataupun pada saat usia tua dan memasuki usia pensiun nantinya. Jadi, segera daftarkan diri Anda menjadi bagian dari peserta BPJS Ketenagakerjaan secepatnya! Anda yang berstatus dalam hubungan kerja ataupun di luar hubungan kerja bisa menikmati manfaat tersebut.

Dasar yang melandasi bahwa risiko dapat diasuransikan dan siapa yang bisa mengasuransikannya adalah konsep *insurable interest*. Suatu *insurable interest* ada hanya apabila tertanggung (pemegang polis) akan menderita suatu kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan kerusakan atau menimbulkan kerugian pada objek yang diasuransikan oleh tertanggung. bentuk perlindungan terhadap hak-hak Nelayan di Desa Tasikmadu kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

Perlindungan terhadap nelayan mandiri yang mana dapat dikatakan Nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara Mandiri disebutkan sarana dan prasana yang di pakai bersumber pada nelayan itu sendiri. Dalam Teknisnya kecelakaan dapat di golongankan menjadi dua kejadian diantaranya sebagaimana berikut:

1) Kecelakaan yang di sebabkan oleh subjeknya (error in Personalia)

Kecelakaan yang terjadi karena beberapa faktor yang ada adalah kelalian terhadap subjeknya/ personnya dapat di katakan kelalalian, jika mana orang tidak dapat mengingat sesuatu secara baik dan jelas. kemudian tidak adanya kehati-hatian terhadap kinerja (kerja) pada tindakan sesuatu. Misalnya adalah seorang nelayan melakukan pelayaran dengan tidak menghiraukan keselamatannya yang dimaksudkan adalah tidak membawa perlengkapan keselamatan dengan sadarnya bahwa perlengkapan keselamatan merupakan syarat berlayar menurut peraturan yang ada.

Kelalaian dalam memperhatikan standart, informasi dan keadaan cuaca yang akan terjadi di dalam rute maupun jalur dalam pelayaran. Kecelakaan pada subjek sering di karenakan terjadi karena berbagai faktor yang ada. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dapat di minimalisir dengan upaya melakukan pendaftaran pelayaran yang dilakukan secara keberangkatan dan kepulangan setelah melakukan pelayaran di laut kepada badan yang menangani keberangkatan dan kepulangan Nelayan yang melakukan pelayaran.

2) Dan kecelakaan pada barangnya (error in Substantia)

Yakni kerusakan atau hilangnya fungsi di dalam suatu benda yang semestinya dapat difungsikan secara fungsional dari pabriknya sehingga tidak dapat di pakai sebagaimana fungsi standartnya.

Selayaknya dalam melakukan pelayaran sebuah kapal ataupun dayung yang digunakan harus mempunyai kelayakan dalam pemakaiannya sehingga dapat dinilai secara formil untuk layak pemakaiannya. Sehingga dapat dilakukannya pelayaran yang sesuai dengan amanah undang-undang yang ada maupun peraturan tambahan yang bersifat mempersempit kecelakaan di dalam pelayaran.

Selain di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 yang mengatur perlindungan terhadap nelayan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat berbagai ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan tentang tatacara dan aturan dalam bekerja, baik dilakukan dalam berbagai macam

pekerjaan yang ada. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaannya guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Dalam undang-undang ketenaga kerjaan pekerjaan harus dilakukan dengan menggunakan batasan waktu yakni siang hari ataupun malam hari, akan tetapi kebanyakan di dalam pelaksanaannya tidak terpaku dalam nelayan yang ada di desa Tasikmadu kecamatan Watulimo kabupaten trenggalek ini, yang mana dalam pelaksanaannya pelayaran dilakukan secara kebutuhan.

Secara kebutuhan pekerjaan nelayan adalah nelayan di sesuaikan dengan kapasitas kapal yang dinaikinya. Jika di kaitkan dengan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah selama ini, yakni masih lazimnya perlindungan yang dilakukan secara tradisi yang dilakukan di Masyarakat lokal yang ada. Beberapa pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Khususnya Pemerintah Desa Tasikmadu terhadap hak-hak nelayan.

- 1) Nelayan diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan kelayakan alat tangkap yang digunakan dan tidak menentang peraturan Perundang-undangan yang ada.
- 2) Nelayan di bebaskan untuk melakukan penangkapan ikan di kawasan laut Prigi.
- 3) Pemerintah memberikan kemudahan proses ataupun bantuan terhadap nelayan yang mengalami kecelakaan kerja baik yang terjadi akibat alam dan orangnya sendiri melalui Asuransi.
- 4) Nelayan mendapatkan bekal ataupun pengetahuan dan penanggulangan keselamatan kerja yang di lakukan oleh lembaga yang terkait yaitu Syahbandar Pelabuhan Prigi.
- 5) Pemerintah memberikan perlindungan keselamatan kerja kepada nelayan dalam bentuk, aturan dan tatacara pelaksanaan pelayan yang sesuai dengan standar nelayan yang baik dan benar.
- 6) Memberikan bantuan kemanusiaan terhadap nelayan yang mengalami kecelakaan hilang nyawa di laut dan memberikan pelayanan keperluan untuk terselesainya masalah terhadap korban kecelakaan tersebut.
- 7) Pemerintah Desa memberikan kemudahan dalam hal perizinan pembuatan kapal penangkapan ikan.

Pekerjaan Nelayan secara mandiri yang dilakukan di Desa Tasikmadu kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek ini secara umum di kelola dari berbagai macam kekayaan pribadi seorang nelayan tersebut, namun ada juga yang dilakukan secara bersama-sama misalnya adalah kapal nelayan yang dikelola secara bersama-sama yakni dikelola secara kekeluargaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan dan Pertambakan Garam. Jika dikaitkan dengan keadaan dilapangan hampir efektif sesuai dengan amanah yang di tuliskan dalam undang-undang tersebut walaupun dalam proses pelaksanaannya masih terjadi berbagai macam permasalahan yang ada, yaitu masalah secara yurisprudensi maupun permasalahan yang timbul secara baru.

Pelabuhan pantai prigi dalam skala penangkapannya tergolong penangkapan yang masih tradisional dilihat dari penangkapan yang dilakukan oleh nelayan dan sarana dan prasarana yang ada. Akan tetapi jika di lihat dari tujuan undang-undang dan peraturan yang ada pemerintah memberikan sarana dan prasarana

yang ada di lapangan sesuai dengan amanah undang-undang yang berlaku untuk perlindungan kepada hak nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan baik yang dilakukan secara mandiri maupun secara berkelompok.

1. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha

Dalam melakukan penangkapan ikan nelayan tidak ada larangan untuk melakukan penangkapan ikan secara besar-besaran maupun secara minimum ataupun tidak boleh melakukan penangkapan di sembarang tempat. Sarana dan prasarana yang ada dapat dikatakan membantu, yang mana nelayan kecil dapat melakukan penangkapan ikan dengan memancing di ujung dermaga, dengan menggunakan kapal-kapal kecil yang dapat dilakukan di lingkungan dermaga dan di area dalam teluk pelabuhan prigi.

Penyediaan sarana dan prasana di Desa Tasikmadu kecamatan watulimo kabupaten trenggalek khususnya di Pelabuhan Perikanan Nelayan prigi ini sudah baik dan berkembang. Ini dilihat selama saya melakukan, hidup, dan juga sebagai warga daerah lokal yang mata pencaharian saya sebagai nelayan kecil. Dalam pengembangan usaha sudah terdapat berbagai macam toko maupun orang yang menyediakan peralatan penangkapan ikan yang sudah sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan

Usaha penangkapan ikan secara berkelompokan maupun secara mandiri ini layak dikatakan sebagai usaha yang berkelanjutan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penangkapan ikan semakin hari semakin mengalami kemajuan yang baik. Berkelanjutan dapat disimpulkan bahwa usaha tersebut tidak akan mudah berhenti dengan alasan yang dianggap tidak mengganggu usaha tersebut.

Hal ini dapat dilihat dilapangan khususnya di sektor perikanan di desa tasikmadu yang mengalami peningkatan nilai permintaan kebutuhan ikan laut dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Seiring dengan perkembangan global profesi nelayan sangatlah di butuhkan dan bahkan di jadikan profesi yang mulia dikarenakan dapat menghasilkan sumber pangan yang memberikan nilai yang baik untuk keberlangsungan hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

3. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan

Mengelola sumber daya ikan tidak dapat dihindarkan dengan alat tangkap tradisional yang di pakai oleh nelayan mandiri/lokal dikarenakan jangkauan pelayaran dan ikan yang berkembang biak di daerah prigi ini. Peningkatan penangkapan dapat dilihat dengan adanya rumpon-rumpon yang di pasang oleh nelayan pada daerah di dekat peisir pantai yang bertujuan untuk memberikan rumah ikan yang dapat menarik ikan yang berukuran besar hingga di rumpon tersebut kemudian dapat menangkap ikan yang berada di daerah rumpon-rumpon tersebut. Walaupun dalam pelaksanaan kita tetap menunggu musim maupun waktu-waktu tertentu untuk melakukan penangkapan ikan yang berada di lautan.

4. Menumbuh kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha

Pembiayaan ataupun permodalan dalam melakukan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan desa Tasikmadu bermacam-macam sesuai dengan keperluan yang dilakukan oleh si nelayan yang akan melakukan kegiatan pelayaran penangkapan ikan tersebut. Faktanya dalam melakukan penangkapan ikan masyarakat desa tasikmadu menggunakan biaya secara mandiri/biaya sendiri.

5. Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran

Bentuk perlindungan risiko dalam melakukan pelayaran ini sangatlah besar namun dengan adanya pengetahuan dan ilmu yang berkembang maka dapat kita minimalisir maupun kita kurangi resiko bencana tersebut. Bencana alam yang terjadi di lautan tidak dapat di predikdi dengan akurat. Oleh karena itu terdapat lembaga yang memberikan informasi, ataupun koreksi terhadap nelayan yang melakukan pelayaran yang akan dilaksanakan dalam trip pelayaran tersebut.

Syahbandar melayani keberangkatan dan kepulangan nelayan yang akan melakukan perjalanan pelayaran pada kapal. Sesuai dengan peraturan sesuai dengan jabatannya atau kaptrn kapal yang di anggap tinggi melakukan pelaporan kepada syabandar bahwa akan melakan pelayaran sehingga petugas syahbandar akan memebrikan strandar dan koreksi jika terdapat alat maupun alat keselamatan yang harus dibawa dan dilengkapi pada kapal yang hendaknya melakukan pelayaran.

PENUTUP

Berdasarkan Pasal 30 ayat 2 huruf b Undang-Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam menyatakan jika terjadi kecelakaan kerja yang khususnya adalah hilangnya nyawa ialah dengan menggunakan perjanjian asuransi laut berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, akan tetapi dalam pelaksanaannya antara pemerintah dengan masyarakat masih terjadi ketidak fahaman akan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan peraturan tersebut bertujuan untuk mengurangi resiko nelayan dalam melakukan profesinya dan sebagai alat pengantian kerugian terhadap korban hilangnya nyawa pada nelayan berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Bentuk perlindungan hak-hak nelayan yang ada maupun yang penulis lihat sebagian besar sudah sesuai dengan tujuan di Undang-Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, hal ini dapat dibuktikan dengan kemajuan fasilitas yang ada di dermaga, peralatan nelayan yang sesuai dengan aturan dan berstandar Nasional hal ini di dukung oleh adanya progam pemerintah desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek yang mendukung dan kelembagaan yang ada di pelabuhan perikanan Prigi yang memberikan pengawasan serta fasilitator nelayan kecil, nelayan mandiri sehingga hak-hak sebagai nelayan dapat dijamin oleh Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Haris Herdiansyah, (2010) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Selemba Empat.
- Sastrawidjaya, (2002) *Nelayan Nusantara*. Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Jakarta: Tgl 9 April 2019.
- Satjipto Raharjo, (2000) *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-press.
- Suharsini Arikunto. (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Sunggopo Bambang. (2002) *Metode Pemelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparlan. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks Indonesia*. Malang: Madani. h. 25
- Zainudin Ali, (2016) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.